El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 7 No 2 (2026) 1104 - 1123 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i2.10536

Dampak Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nuralam[1], Agnes Ratih Ari Indriyani[2], Djoko Wijono[3]
Universitas Proklamasi 45[1,3], universitas Janabadra Yogyakarta[2]
alam@up45.ac.id[1], agnes@janabadra.ac.id[2], djowi@up45.ac.id[3]

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of Regional Original Revenue (PAD), Balancing Funds (DP) consisting of the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Revenue Sharing Fund (DBH), as well as the Gross Regional Domestic Product (GRDP) on the Human Development Index (HDI). The research was conducted using a quantitative descriptive method aimed at explaining empirical phenomena supported by patterns of relationships among variables, characteristics, and statistical data. Secondary data in the form of time series data over 15 years (2010–2024) were analyzed using multiple linear regression.The results of the statistical analysis show that PAD and DP each have no positive and significant effect on HDI when tested partially. Meanwhile, GRDP has a positive and significant partial effect on HDI. However, simultaneously, the variables PAD (X1), DP (X2), and GRDP (X3), based on the F-test hypothesis, have a positive and significant effect on HDI. In other words, these three variables, both directly and indirectly, contribute jointly to the achievement of the HDI score in Sleman Regency during the study period. In 2024, Sleman's HDI reached 84.91, classified as "Very High," surpassing the HDI of Yogyakarta Special Region Province in 2024, which was 81.62 ("Very High"), and the national HDI of 75.02 ("High"), an achievement truly worthy of appreciation.
Keywords: Regional Original Revenue, Balancing Funds, Gross Regional Domestic Product, Human Development Index

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP) yang terdiri atas Dana alokasi umum (DAU), Dana alokasi khusus (DAK) dan Dana bagi hasil (DBH) serta Produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap Indeks pembangunan manusia (IPM). Selanjutnya penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena empiris yang didukung pola hubungan antar variabel, karakteristik dan data statistik. Data sekunder, data runtun waktu (*time series*) selama 15 tahun (2010 - 2024), dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis statistik menemukan bahwa PAD dan DP masing-masing secara parsial tidak berdampak positif dan signifikan terhadap IPM. Sementara PDRB secara parsial berdampak positif dan signifikan terhadap IPM. Tetapi secara simultan variabel PAD (X1), DP (X2) dan PDRB (X3) melalui uji hipotesis F berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Dengan perkataan lain, bahwa ketiga variabel ini, secara bersama-sama baik secara langsung maupun tidak langsung ikut berkontribusi terhadap pencapaian angka IPM Kabupaten Sleman pada periode tahun analisis. IPM tahun 2024 mencapai angka sebesar 84,91 kategori "Sangat Tinggi", melampaui capaian IPM Provinsi

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 2 (2026) 1104 - 1123 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i2.10536

Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 sebesar 81,62 (kategori sangat Tinggi) dan IPM secara nasional 75,02 kategori "Tinggi", sebuah pencapaian yang sungguh patut diapresiasi.
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Produk Domestik Regoinal Bruto, Indeks Pembangunan Manusia.

PENDAHULUAN

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu indikator ketercapaian pembangunan suatu wilayah (daerah dan negara) diukur dari tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi dari perspektif standar hidup masyarakat. Ketiga dimensi tersebut memberikan gambaran tentang kualitas hidup masyarakat, di mana dimensi (i) Kesehatan diukur dari usia harapan hidup saat lahir; (ii) Pendidikan diukur dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk; dan (iii) Ekonomi terkait dengan standar hidup layak diukur dari pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat.

Dilansir dari berbagai sumber, konsep IPM pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom berkebangsaan Pakistan Mahbub ul Haq (1934-1998) dan Amartya Kumar Sen (1933-1985) yang berkebangsaan India peraih Nobel di bawah kerjasama dengan Program pembangunan perserikatan bangsa-bangsa (UNDP) tahun 1990. IPM adalah statistik yang diprogreskan dan disusun oleh jaringan pembangunan internasional di bawah koordianasi Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang dikenal sebagai UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur berbagai tingkat pembangunan sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk membantu negara-negara berkembang mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Menurut Todaro dan Stephen C. S. (2011:128) bahwa IPM memberikan gambaran tentang kemajuan sumberdaya manusia dilihat dari segi perkembangan, pemerataan dan keadilan mencakup bidang kesehatan, pendidikan dan kemakmuran masyarakat. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, ternyata IPM adalah salah satu dasar penentuan besaran perolehan dana alokasi umum (DAU) yang ditransfer ke wilayah provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia.

Riset ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman, dengan alasan berdasarkan data statistik dari berbagai sumber menggambarkan daerah ini tingkat pencapaian IPMnya melampaui pencapaian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan IPM nasional, di satu segi, sementara di segi lain, perolehan pendapatan asli daerah (PAD), besarnya nilai transfer dana perimbangan, dan produk domestik regional bruto (PDRB) secara kuantitatif menunjukkan angka lebih tinggi daripada perolehan kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Kondisi demikian menginspirasi penulis untuk menelaah dan mengkaji lebih mendalam.

Sleman adalah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi DIY dengan jumlah penduduk tahun 2024 sebanyak 1.118.353 jiwa (Dukcapil.slemankab.go.id) yang terdiri dari 17 kecamatan (kapanewon). Sementara dari segi tingkat ketercapaian IPM, Sleman mengalami kemajuan sangat signifikan dalam periode 15 tahun sejak tahun 2010 sebesar 79,69 (kategori tinggi) hingga tahun 2024 berhasil mencapai angka sebesar 85,71 (kategori sangat tinggi) sesuai dengan standar *United*

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 2 (2026) 1104 - 1123 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i2.10536

Nations Development Programme (UNDP) melampaui pencapaian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Indonesia pada periode yang sama. Pencapaian Provinsi DIY tahun 2010 dan 2024 masing-masing sebesar 75,37 dan 81,62, sedangkan IPM Indonesia pada tahun yang sama masing-masing sebesar 66,53 dan 75,02.

Pencapaian angka IPM tersebut diduga atas pengaruh dari kontribusi; (i) Pendapatan asli daerah (PAD) yang secara konsisten terus mengalami pertumbuhan; (ii) Transfer Dana perimbangan (DP) yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH); dan (iii) Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan (PDRB-AHK).

Kabuapten Sleman termasuk adalah bagian dari daerah di Indonesia yang memiliki PAD relatif tinggi, berkontribusi sebesar 36,93% terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2024, tumbuh 37,5% per tahun periode tahun 2010 - 2024. Seiring dengan tingginya kontribusi tersebut menyebabkan kemandirian fiskal, Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori "Tinggi" sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No. 84 tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Sementara itu, besarnya transfer pemerintah pusat yang terhimpun ke dalam Dana Perimbangan (DP) yang diterima Pemerintah Kabupaten Sleman periode tahun 2010 – 2024 mengalami pertumbuhan signifikan yaitu 8,2% per tahun, begitu pula PDRB-AHK juga mengalami kenaikan sebesar 6,2% per tahun.

Untuk melihat realisasi perkembangan terhadap Pendapatan asli daerah (PAD), Dana perimbangan (DP), Produk domestik regional bruto (PDRB) dan ketercapaian Indeks pembangunan manusia (IPM), dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1. Keadaan PAD, Dana Perimbangan & PDRB Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2010 - 2024

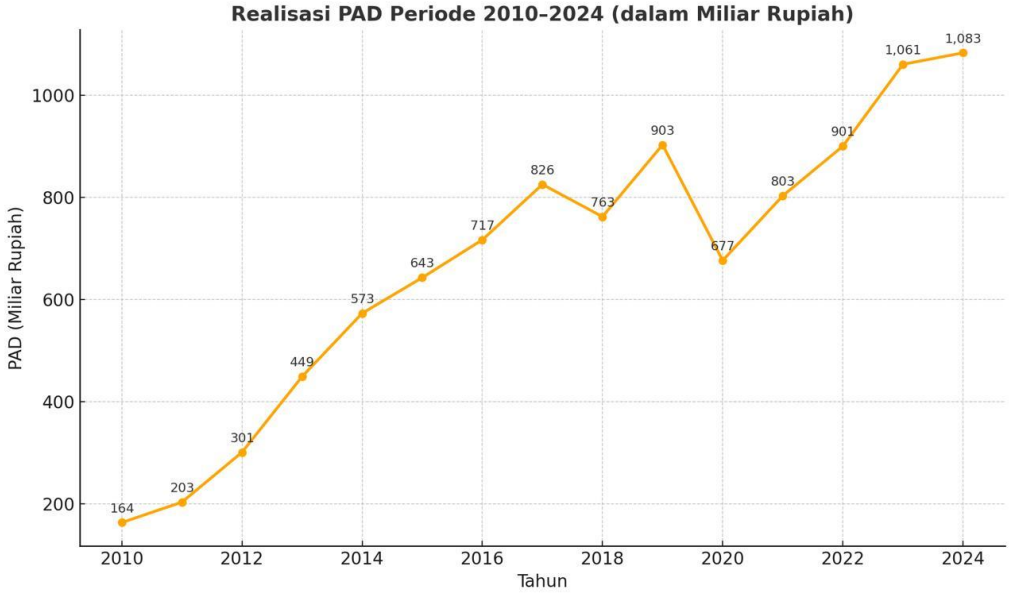
No	Tahun	PAD	DP	PDRB
1	2010	163.530.209.690,15	737.807.079.540,00	21.481.000,00
2	2011	203.416.683.768,00	737.072.791.549,00	22.645.000,00
3	2012	301.069.539.284,13	946.821.049.150,00	23.957.113,00
4	2013	449.270.304.864,83	992.782.430.677,00	25.367.414,00
5	2014	573.337.599.560,11	1.034.404.522.916,00	26.713.071,00
6	2015	643.130.079.828,03	1.052.113.628.931,00	28.098.007,00
7	2016	717.151.176.028,57	1.321.660.504.762,00	29.573.995,00
8	2017	825.637.751.681,82	1.335.572.521.296,00	31.155.675,00
9	2018	762.514.523.460,00	1.492.722.938.000,00	33.139.200,00
10	2019	903.278.920.723,56	1.387.029.665.450,00	35.289.808,00
11	2020	676.743.940.021,93	1.276.282.956.000,00	33.906.370,00
12	2021	803.379.359.000,00	1.532.784.261.425,00	35.791.564,00

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 2 (2026) 1104 - 1123 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i2.10536

13	2022	900.527.254.074,00	1.584.977.596.000,00	37.596.424,00
14	2023	1.060.861.116.561,00	1.528.699.199.000,00	39.508.677,00
15	2024	1.083.331.902.103,00	1.642.376.329.000,00	41.484.110,00

Sumber : Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

(i) Realisasi perkembangan PAD Kabupaten Sleman periode tahun 2010-2024



Berdasarkan tabel 1 di atas dan menyimak tampilan diagram garis menggambarkan bahwa Kabupaten Sleman memperoleh PAD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan periode tahun 2010 hingga 2017 secara kuntitatif tumbuh rata-rata sebesar Rp 82,763 miliar per tahun (tumbuh di atas 40% per tahun), sedangkan tahun 2018 penerimaan PAD mengalami penurunan akibat dari penurunan pendapatan riil mayarakat menyebabkan daya beli juga ikut menurun. Sejak tahun 2020-2022 realisasi PAD mengalami penurunan drastis dibanding periode sebelumnya sebagai dampak terjadinya Pandemi Covid-19.

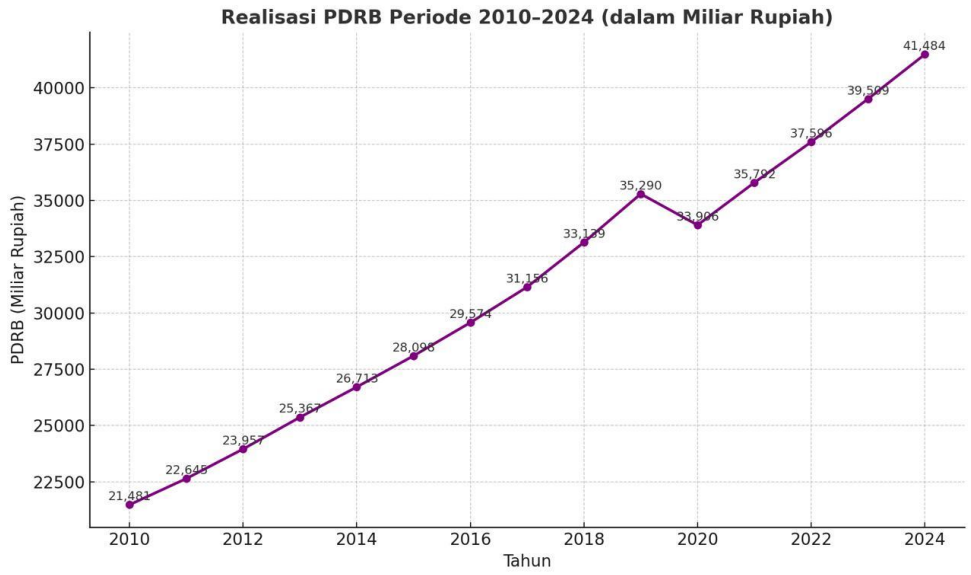
El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 2 (2026) 1104 - 1123 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i2.10536

(i) Realisasi perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Sleman periode tahun 2010-2024



Tabel 1 dan diagram garis menunjukkan peningkatan penerimaan Dana perimbangan periode tahun 2010 hingga 2018, tumbuh sebesar Rp 94,364 miliar per tahun (tumbuh 10,2% per tahun), namun akibat adanya Pandemi Covid-19 tahun 2020 penerimaan Dana perimbangan dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan relatif drastis.

(ii) Realisasi perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sleman periode tahun 2010-2024



El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 2 (2026) 1104 - 1123 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i2.10536

Menyimak tabel 1 dan pergerakan diagram garis ternyata bukan hanya PAD dan Dana perimbangan yang mengalami peningkatan relatif tinggi terutama periode tahun 2010 – 2018 ternyata Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) mengalami hal yang sama. Tahun 2020 juga mengalami hal yang sama di mana PDRB juga mengalami penurunan, kemudian secara berangsur mengalami kenaikan tahun 2021 hingga 2024.

(iii) Realisasi perkembangan Indeks Pembangunan (IPM) Kabupaten Sleman, Provinsi DIY dan Indonesia periode tahun 2010-2024

Tabel 2. Keadaan IPM Kab SLEMAN, Prov DIY & Indonesia tahun 2010 - 2024

No	Tahun	Sleman	DIY	Indonesia
1	2010	79,69	75,37	66,53
2	2011	80,04	75,93	67,09
3	2012	80,10	76,15	67,70
4	2013	80,26	76,44	68,31
5	2014	80,73	76,81	68,90
6	2015	81,20	77,59	69,55
No	**Tahun**	**Sleman**	**DIY**	**Indonesia**
7	2016	82,15	78,38	70,18
8	2017	82,85	78,89	70,81
9	2018	83,42	79,53	71,39
10	2019	83,85	79,99	71,92
11	2020	83,84	79,95	71,94
12	2021	84	80,22	72,29
13	2022	84,31	80,65	72,91
14	2023	84,86	81,09	73,93
15	2024	84,91	81,15	73,98

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab S;leman, BPS Provinsi DIY & BPS Pusat

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 2 (2026) 1104 - 1123 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i2.10536



Tabel 2 dan diagram garis di atas menggambarkan bahwa ketercapaian indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Sleman menunjukkan pergerakan kenaikan signifikan sejak periode tahun 2010 sebesar 79,69 (kategori tinggi) hingga 2024 sebesar 85,71(kategori sangat tinggi). Periode yang sama IPM Provinsi DIY tahun 2010 sebesar 75,37 (kategori tinggi) dan 2024 sebesar 81,15 (sangat tinggi), IPM Nasional (Indonesia) periode tahun 2010 sebesar 66,53 (kategori sedang) dan tahun 2024 sebesar 73,98 (kategori tinggi).

Mengacu pada kondisi riil sesuai data statistik dari berbagai sumber instansi pemerintah dalam 15 tahun terakhir (2010 – 2024) menggambarkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki kapasitas dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan publik (*public service function*) maupun pembangunan (*development function*) dapat berjalan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena empiris yang didukung pola hubungan antar variabel, karakteristik dan data statistik. Adapun sumber data yang digunakan dalam studi ini berupa data sekunder, yakni data runtun waktu (*time series*) selama 15 tahun (2010 - 2024), yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan BPS Kabupaten Sleman; Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dan Media *online*.

Melansir dari pendapat Sugiono (2018) penelitian yang bersifat kuantitatif, yaitu memanfaatkan data berupa angka-angka yang dihitung secara statistik sebagai alat uji terkait dengan permasalahan untuk menghasilkan kesimpulan. Untuk itu penelitian ini akan menguji hipotesis tentang dampak Pendapatan asli daerah (PAD), Dana perimbangan (DP), Produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Sleman periode 2010 - 2024.

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 2 (2026) 1104 - 1123 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i2.10536

Adapun yang menjadi variabel dependen dalam riset ini adalah Pendapatan asli daerah (X1), Dana perimbangan (X2), dan Produk domestik regional bruto (X3), variabel independen yaitu Indeks pembangunan manusia (Y)." Sedangkan data sekunder ini berupa realisasi penerimaan PAD, DP, PDRB, dan angka ketercapaian IPM Kabupaten Sleman periode tahun 2010 – 2024. Data ini akan dianalisis menggunakan regresi linier berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.986[a]	.972	.964	.36220

a. Predictors: (Constant), PDRB, PAD, DP

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	49.607	3	16.536	126.046	.000[b]
	Residual	1.443	11	.131		
	Total	51.051	14			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), PDRB, PAD, DP

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	72.599	.919		79.001	.000
	PAD	-1.154E-012	.000	-.173	-.941	.367
	DP	1.417E-012	.000	.225	1.200	.255
	PDRB	2.845E-007	.000	.934	4.634	.001

a. Dependent Variable: IPM

Model persamaan regresi:

Y = 72.599 -1,154PAD +1.417DP +2.845PDRB

Uji Hipotesis F:

Dengan melihat nilai Sig. pada uji F sebesar 0.000 < 0.05 berarti PAD, DP, dan PDRB secara simultan berpengaruh terhadap IPM

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 2 (2026) 1104 - 1123 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i2.10536

Uji Hipotesis t:

- Dengan melihat nilai Sig. variabel PAD sebesar 0.367 > 0.05 berarti PAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap IPM.
- Dengan melihat nilai Sig. variabel DP sebesar 0.255 > 0.05 berarti DP secara parsial tidak berpengaruh terhadap IPM.
- Dengan melihat nilai Sig. variabel PDRB sebesar 0.001 < 0.05 berarti PDRB secara parsial berpengaruh terhadap IPM.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa :

(1) Nilai t hitung variabel pendapatan asli daerah adalah sebesar -941 < nilai t tabel = 2,179, dengan tingkat signifikansi 0,367 > 0,05. Artinya pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia adalah negatif sebesar -1,154. Artinya pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan demikian hipotesis nol diterima dan hipotesis kerja ditolak. Sehingga hipotesis pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten Sleman periode tahun 2010 – 2024.

(2) Nilai t hitung variabel dana perimbangan adalah sebesar 1,200 < nilai t tabel = 2,179, dengan tingkat signifikansi 0.255 > 0,05. Artinya dana perimbangan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.. Variabel dana perimbangan memiliki koefisien regresi sebesar 1.417 terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan kurang berkontribusi terhadap indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, hipotesis nol diterima. Jadi hipotesis yang berbunyi dana perimbangan secara parsial berpengaruh signifikans terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman periode tahun 2010 – 2024, tidak terbukti.

(3) Nilai t hitung variabel produk domestik regional bruto adalah sebesar 4,634 > nilai t tabel = 2,179, dengan tingkat signifikansi 0,001 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto memiliki dampak yang besar terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel produk domestik regional bruto memiliki koefisien regresi positif terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 2,845. Hal ini menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto berkontribusi terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan demikian hipotesis nol ditolak, sedangkan hipotesis kerja diterima. Sehingga hipotesis bahwa produk domestik regional bruto memberikan efek positif relatif besar terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten Sleman periode tahun 2010 – 2024, terbukti dan diterima kebenarannya.

(4) Nilai F hitung adalah sebesar 126,046 < nilai F tabel yaitu 3,587 Taraf signifikasi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti hipotesis nol ditolak dan hipotesis kerja diterima. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan produk domestik regional bruto secara simultan berpengaruh signifikan

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 2 (2026) 1104 - 1123 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i2.10536

terhadap variabel indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sleman.

Dampak Pendapatan Asli Daerah Secara Parsial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif tinggi terhadap APBD, yaitu sekitar 15,88% tahun 2010 dan tumbuh menjadi 36,93% tahun 2024, mengalami pertumbuhan signifikan yakni mencapai angka 37,5% per tahun, di mana PAD tahun 2010 sebesar Rp 163.530.209.690,15 tumbuh menjadi Rp 1.083.331.902.103,00 tahun 2024.

Diakui bahwa periode tahun 2019 ke tahun 2020 penerimaan PAD tumbuh negatif sebesar -25% akibat adanya Pandemi Covid-19, meskipun demikian berkat kerja keras semua pihak (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) aktivitas ekonomi secara nasional kembali berjalan normal. Kondisi yang sama juga terjadi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, lebih khusus di Kabupaten Sleman aktivitas perekonomian secara berangsur-angsur mulai membaik. Sehingga periode tahun 2020 ke tahun 2021 kembali tumbuh positif sebesar 18,7% hingga tahun 2024 menunjukkan *trend* positif.

Dari sisi kemandirian fiskal, Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori "Tinggi" sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) No. 84 tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Meskipun secara kuantitatif menunjukkan angka relatif "fantastis", hasil perhitungan statistiknya justru menggambarkan bahwa PAD tidak signifikan dan tidak berdampak langsung terhadap pencapaian IPM.

Dari berbagai argumen hasil riset menguraikan bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah pengalokasian dana yang tidak berimbang dengan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur. Umumnya pembiayaan aktivitas pembangunan yang bersumber dari dana PAD lebih banyak diarahkan ke hal-hal yang tidak mendukung tiga dimensi pencapaian IPM, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Realitas ini didukung oleh Rizki Kurniasari, (2021) bahwa PAD terbukti tidak berdampak signifikan terhadap IPM wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2017-2019. Fernandes J, Megi Laila Putra, (2022) menemukan bahwa PAD tidak berdampak signifikan terhadap IPM di 19 wilayah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat. Disusul hasil riset Zainuddin et,al, (2022) bahwa PAD berdampak negatif terhadap IPM, hal ini bukan berarti bahwa PAD tidak perlu dimaksimalkan pengelolaannya, tetapi sangat penting dan strategis untuk menaikkan perolehan PDRB yang pada gilirannya akan berdampak pada kenaikan ketercapaian IPM.

Selanjutnya hasil riset ini juga didukung oleh Fadhly (2017) bahwa PAD memiliki hubungan negatif dengan IPM, hal ini terjadi karena pengelolaan sumber-sumber PAD kurang intensif sehingga belum potensial untuk memenuhi kebutuhan daerah. Pendapat Wiliantara dan Budiasih (2016) bahwa PAD tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dinilai kurang

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 2 (2026) 1104 - 1123 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i2.10536

bijaksana dalam mendistribusikan secara proporsional untuk kepentingan publik. Kemudian riset (Riviando *et al*., 2019) mengungkap bahwa PAD tidak berdampak terhadap IPM, karena belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber PAD potensial. Pendapat yang sama juga ditemukan oleh Sahlan. E, Yusuf, Dodo Susanto (2022) bahwa PAD tidak berdampak terhadap IPM di wilayah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal yang sama juga ditemukan oleh Claudia Melgiana, A, I Wayan Rupa, Ni Putu Riasning (2020), bahwa PAD tidak berdampak pada peningkatan ketercapaian IPM di wilayah kabupaten dan kota Provinsi Bali.

Sejatinya melalui pengelolaan sumber-sumber PAD, aparat di daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk meng-*handle* pembiayaan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal daerah sesuai dengan potensi masing-masing. Adapun upaya yang bisa dilakukan dalam rangka peningkatan PAD yakni:

(i) Kebijakan ekstensifikasi yakni dengan mendata sumber-sumber penerimaan pajak yang baru sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini, menggali sumber pajak baru yang belum tersentuh dan menciptakan jenis retribusi baru atau memanfaatkan aset pemerintah daerah yang tidak terpakai; dan

(ii) Kebijakan intensifikasi yakni dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber dalam pengenaan besaran tarif retribusi, pajak dan pendapatan lainnya sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini, termasuk mengoptimalkan pemanfaatan kepemilikan aset serta meningkatkan pelayanan demi kemandirian masyarakat.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Dwi Anitasari, dan Niniek Imaningsih (2024) yang melakukan riset di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur bahwa PAD berdampak positif dan signifikan terhadap IPM. Dengan alasan bahwa penerimaan PAD yang tinggi, pemerintah daerah dapat mengalokasikan pembiayaan pembangunan infrastruktur di sektor pendidikan, kesehatan serta fasilitas pendukung aktivitas ekonomi yang representatif. Pendapat yang sama didukung oleh Resti Paramita, O. (2021) yang melakukan riset di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2018. Begitu pula pendapat Rizkiyah, J, Hening Anitasari (2023), yang menemukan hal yang sama di mana PAD berdampak positif terhadap IPM di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Dampak Dana Perimbangan Secara Parsial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Bersumber dari data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman (http://bkad.slemankab.go.id) bahwa transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terhimpun ke dalam Dana Perimbangan (DP) yang diterima Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2010 – 2024 mengalami pertumbuhan sigifikan yaitu 8,2% per tahun. Data tahun 2010 jumlah dana perimbangan sebesar Rp 163.530.209.690,15 berkontribusi sebesar 14,9% dari total APBD sebesar Rp 1.096.205.412.740,00. Tumbuh menjadi Rp 1.642.376.329.000,00 tahun 2024

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 2 (2026) 1104 - 1123 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i2.10536

dengan kontribusi sebesar 51,0% dari APBD sebesar Rp 3.206.150.616.887,00.

Ternyata tidak hanya pendapatan asli daerah yang mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -25% tahun 2020, tetapi juga tranfer pemerintah pusat ke Kabupaten Sleman berupa dana perimbangan mengalami hal yang sama, yakni tumbuh negatif sebesar -7,9%, kondisi yang sama juga dialami bukan hanya pada *level* pemerintahan provinsi, bahkan hal yang sama juga dialami kabupaten kota seluruh Indonesia.

Kontribusi sumber dana perimbangan (DP) relatif signifikan tersebut, ternyata tidak didukung hasil analisis statistik, di mana dampak DP tidak signifikan terhadap IPM. Berbagai argumen tersebut bisa dipahami, karena IPM dihitung berdasarkan faktor-faktor lain. IPM merupakan parameter yang dimanfaatkan untuk menghitung tingkat perkembangan manusia. IPM dihitung berlandaskan atas tiga dimensi utama, yaitu : (i) panjang usia harapan hidup & sehat; (ii) *level* pendidikan yang memadai; dan (iii) standar hidup layak dan mumpuni. Sementara dana perimbangan merupakan alokasi dari APBN kepada daerah untuk pelaksanaan otonomi dalam bentuk *block grand*. Selain itu, juga diketahui sejumlah faktor yang ikut mempengaruhi IPM, antara lain: (i) pengeluaran per kapita; (ii) harapan lama sekolah; (iii) garis kemiskinan; dan (iv) tingkat pengangguran terbuka.

Sejalan dengan uraian di atas, didukung pula oleh hasil riset Evi Sulastri & Efendri (2020) bahwa perolehan DAU, DAK dan DBH yang terhimpun ke dalam dana perimbangan berdampak negatif dan signifikan terhadap IPM di seluruh kabupaten dan kota Provinsi di Kalimantan (5 provinsi), dengan rincian, antara lain:

(1) DAU bagian dari dana transfer APBN yang pemanfaatannya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Dalam penelitian ini menemukan bahwa DAU berdampak negatif terhadap IPM. Karena ternyata DAU lebih dominan penggunaannya terhadap belanja pegawai (ASN) dibandingkan untuk belanja modal. Data menunjukkan bahwa jumlah DAU yang besar diterima daerah yang bersangkutan justru IPM relatif rendah.

(2) Dalam riset ini ditemukan bahwa DAK berdampak negatif dan signifikan terhadap IPM. Penerimaan DAK dalam jumlah relatif besar ternyata tidak berdampak dalam menaikkan IPM di suatu daerah. Daerah yang memperoleh DAK tinggi tidak berbanding lurus dengan pesatnya pembangunan infrastruktur, seperti terbatasnya kelengkapan fasilitas rumah sakit, pembangunan sarana pendidikan Sekolah Menengah Atas dan fasilitas umum lainya.

(3) Alokasi DBH yang tidak proporsional ke berbagai daerah juga menyebakan perubahan tingkat signifikansi terhadap IPM. Pendistribusian DBH belum serta-merta mampu menaikkan ketercapaian angaka IPM meskipun DBH juga bersifat *block grand.*

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 2 (2026) 1104 - 1123 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i2.10536

Pendapat yang berbeda diungkap oleh Pieter Noisirifan de Fretes (2016) bahwa dampak, penerimaan DAU, DAK dan DBH dari APBN yang terhimpun ke dalam Dana perimbangan berpengaruh posistif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Yapen Provinsi Papua. Hasil riset yang sama oleh Setyowati dan Suparwati (2012) terungkap bahwa Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Thomas Soenarko, Ch, Ignatia Martha Hendrati (2023) di Kabupaten Tulungagung. Juga ditemukan Srasa Saswatata, S. (2022) dengan riset dilakukan di Kota Semarang. Selanjutnya Riviando, Adel et,al (2019) juga menemukan, bahwa DAU, DAK dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat).

Dampak Produk Domestik Regional Bruto Secara Parsial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sleman PDRB-ADHK tahun 2010 sebesar Rp 21.481.000,- tumbuh menjadi Rp 41.484.110,0 tahun 2024 atau meningkat rata-rata sebesar 6,2% per tahun. Meskipun tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia juga ikut mempengaruhi turunnya angka PDRB sebesar -3,9%. Selanjutnya PDRB tahun 2021 tumbuh sebesar 5,5%, begitu pula tahun-tahun selanjutnya menunjukkan *trend* meningkat.

Kondisi obyektif ini didukung hasil analisis statistik, bahwa PDRB berdampak positif dan signifikan terhadap IPM artinya setiap ada kenaikan PDRB akan berdampak terhadap peningkatan pencapaian IPM. Akibatnya, baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pelayanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi.

Statement di atas didukung beberapa hasil penelitian seperti Muliza, et, al (2017), bahwa PDRB menunjukkan dampak yang positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh. Hal ini didukung oleh teori dari Kuznet bahwa salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern yakni tingginya *output* perkapita (Todaro dan Stephen C. Smith 2015). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Arafat, L, Wiwiek Rindayati, Sahara (2018) bahwa PDRB per kapita berdampak paling tinggi terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Tengah. Disusul pendapat Zainuddin et,al, (2022) bahwa kenaikan angka IPM diperlukan adanya peningkatan PDRB, karena terbukti PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, yaitu setiap terjadi kenaikan PDRB akan diikuti peningkatan angka ketercapaian IPM di Kota Banda Aceh.

Selanjutnya beberapa hasil penelitian yang mendukung adanya pengaruh posisitif dan sinifikan antara variabel PDRB dan IPM di suatu daerah, antara lain Nur Fitria, D, Asis Riat Winanto, Sayid Abas melakukan riset di DKI Jakarta (2024); Fani Fadillah, et,al (2023) di Provinsi Aceh; Ihsan Maulana, et, al (2022) di Provinsi Banten. Pendapat yang sama ditemukan oleh Aditya S.P. Rontos, George MV Kawung, Steeva YL Tumangkeng (2023) riset di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 2 (2026) 1104 - 1123 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i2.10536

Dampak Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Produk Domestik Regional Bruto Secara Simultan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berlandaskan pada analisis statistik melalui uji hipotesis F, menggambarkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan produk domestik regional bruto secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Variabel pendapatan asli daerah memberikan kontribusi relatif besar terhadap APBD periode tahun 2010 – 2024, sedangkan dari segi pertumbuhan, PAD meraih angka 37,5% per tahun. Kondisi demikian mencerminkan, bahwa Kabupaten Sleman memiliki kemandirian fiskal yang tinggi. Menurut Pambudi dalam Rizki Kurniasari, (2021) bahwa besarnya sumber-sumber penerimaan daerah berkontribusi terhadap pencapaian kemandirian fiskal yang menggambarkan tingginya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Kondisi demikian menunjukkan, bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal di suatu wilayah dapat menggambarkan besarnya kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, di mana kedua hal tersebut merupakan pemberi kontribusi terbesar dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Pada kondisi kapasitas fiskal yang demikian memungkinkan pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan publik dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Variabel dana perimbangan juga ikut berkontribusi dalam penerimaan APBD tahun 2010 sebesar 67,3% dan 51,2% tahun 2024. Pada situasi seperti ini pemerintah Kabupaten Sleman dapat memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan pembangunan yang bersifat layanan dasar umum, perbaikan infrastruktur, mengurangi kesenjangan antar daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Adapun layanan dasar umum dimaksud antara lain : (i) Kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan; (ii) Ketersediaan tempat-tempat pelayanan kesehatan; dan (iii) Fasilitas sosial-ekonomi lainnya.

Variabel produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan, Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah yang tingkat penerimaan PDRBnya "tinggi". Pada saat PDRB yang tinggi berdampak pada, (i) peningkatan *income* per kapita masyarakat; (ii) peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; (iii) peningkatan konsumsi masyarakat; dan (iv) peningkatan penerimaan pajak daerah, yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan PAD.

Variabel indeks pembangunan manusia; angka pencapaian IPM Kabupaten Sleman dalam periode analisis menunjukkan perkembangan relatif tinggi. IPM tahun 2010 sebesar 79,69 (kategori tinggi) terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 berhasil mencapai angka sebesar 85,71 (kategori sangat tinggi) sesuai dengan standar *United Nations Development Programme* (UNDP).

Mengutip dari laman kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman yang dirilis, 19 Desember 2024 (https://slemankab.bps.go.id) melaporkan IPM Kabupaten Sleman tahun 2024 mencapai 85,71, berada dalam kategori "IPM Sangat Tinggi". Meningkat sebesar 0,85 poin dibandingkan IPM tahun 2023 sebesar 84,86.

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 2 (2026) 1104 - 1123 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i2.10536

Selanjutnya dilaporkan tiga dimensi yang menjadi acuan dalam menghitung IPM yakni :

(1) Dimensi usia panjang umur dan hidup sehat, anak yang lahir tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,48 tahun, mengalami kenaikan sebesar 0,22 tahun berbanding dengan yang lahir pada tahun sebelumnya;

(2) Dimensi pendidikan, harapan lama sekolah (HLS) masyarakat yang berusia 7 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,02 tahun berbanding dengan tahun sebelumnya, dari 16,77 meningkat menjadi 16,79 tahun 2024, sementara rata-rata lama sekolah (RLS) masyarakat usia 25 tahun ke atas meningkat 0,32 tahun, dari 11,01 menjadi 11,33 tahun 2024; dan

(3) Dimensi standar hidup layak yang dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat Rp 610.000,- (naik 3,59%) berbanding dengan tahun sebelumnya.

Ternyata pendapat di atas didukung oleh temuan Febrianti L & Diah Anggeraini Hasri, (2022) di mana variabel PAD, Dana perimbangan, dan PDRB secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya (Siswadi, at, al.(2015) menemukan variabel pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, DAK dan DBH yang terhimpun ke dalam dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Sembilan Kabupaten Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun pendapat relatif berbeda dikemukakan oleh Siburian, M.T, et, al. (2018). Penelitian ini menyimpulkan bahwa PAD memberikan kontribusi positif terhadap IPM, dana bagi hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap IPM, dana alokasi umum (DAU) berdampak tidak signifikan terhadap IPM, dana alokasi khusus (DAK) berdampak positif terhadap IPM, dan besaran dana pemerintah daerah berdampak positif terhadap IPM. Lugastoro, D.T, Chandra, F.A, **(**2013) merilis bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berdampak dominan terhadap IPM, selanjutnya diikuti variabel, DAK, PAD, dan DBH. Sedangkan variabel DAU menjadi satu- satunya variabel berdampak negatif terhadap IPM.

Hasil pengamatan penulis dengan berbagai argumen hasil riset (studi pustaka) dari berbagai jurnal ilmiah ada yang berpengaruh positif dan signifikan dengan variabel independen dengan dependen, sebaliknya ada juga yang berpengaruh negatif dan signifikan yang disebabkan karakteristik data yang tidak memungkinkan mendeteksi pengaruh dan pola persebaran data yang tidak sama.

Khusus dalam penelitian ini di mana hasil uji hipotesis F ketiga variabel dependen PAD, DP dan PDRB secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap veriabel independent IPM di Kabupaten Sleman. Dengan perkataan lain, bahwa ketiga variabel ini, secara bersama-sama baik secara langsung maupun tidak langsung ikut berkontribusi terhadap pencapaian angka IPM sebesar 84,91 kategori "Sangat Tinggi", melampaui capaian IPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 2 (2026) 1104 - 1123 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i2.10536

2024 sebesar 81,62 (kategori sangat Tinggi) dan IPM secara nasional 75,02 kategori "Tinggi", sebuah pencapaian yang sungguh patut diapresiasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian di atas, dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Sleman berkontribusi relatif besar terhadap Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2010 sebesar 15,88% dan tahun 2024 sebesar 36,93%, bahkan secara kuantitatif mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 37,5% per tahun periode 2010-2024. Namun secara parsial hasil analisis statistik menunjukkan bahwa PAD tidak signifikan dan tidak berdampak langsung terhadap pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM).
2. Dana perimbangan (DP) terdiri atas Dana alokasi umum (DAU), Dana alokasi khusus (DAK) dan Dana bagi hasil (DBH) yang diterima Pemerintah Kabupaten Sleman periode tahun 2010-2024 tumbuh sigifikan sebesar 8,2% per tahun. Memberikan kontribusi terhadap APBD sebesar 14,9% tahun 2010 dan 51,0% tahun 2024. Tetapi hasil analisis statistik dana perimbangan (DP) secara parsial, tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), disebabkan oleh adanya penggunaan dan pemanfaatan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,2% per tahun, selama periode analisis (2010-2024). Kondisi obyektif ini didukung hasil analisis statistik, bahwa PDRB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) artinya setiap ada kenaikan PDRB akan berdampak terhadap peningkatan pencapaian IPM.
3. Secara simultan, analisis statistik melalui uji hipotesis F yang menggambarkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (DP) dan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Saran

Adapun saran yang diusulkan melalui penelitian ini, disadari oleh penulis bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, penentuan variabel dependen dan rentang waktu periode analisis dinilai kurang dalam menjelaskan dampaknya terhadap variabel independen. Sehingga penelitian selanjutnya diperlukan variabel lain diluar variabel dalam penelitian ini dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan.

Upaya mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perlu digelorakan pada setiap

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 7 No 2 (2026) 1104 - 1123 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i2.10536

instansi/lembaga dalam rangka peningkatan penerimaan daerah yang pada gilirannya dapat membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program yang berkontribusi terhadap peningkatan ketercapaian indeks pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya S.P. Rontos, George MV Kawung, Steeva YL Tumangkeng(2023). Pengaruh PDRB, dan Rata-rata Lama Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, *Jurnal BerkalaI lmiah Efisiensi,*Vol 23, No. 4 hal 133-144.

Anggraini, Yusniah (2023) *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*, Indokamp, E. Library Universitas Brawijaya.

Anitasari, D dan Niniek Imaningsih, (2024). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk). Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"Jawa Timur, *Management Studies and Entrepreneurship Journal,* Vol. 5. No. 1, 2024, hal. 122-128.

Arafat, L, Wiwiek Rindayati, Sahara (2018). Faktor-faktor yang Memengaruhi IndeksPembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan,* IPB, Vol. 7 . No.2 hlm. 140-158.

Asnidar dan Hardi, N.S., (2019). Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Lan- gsa', *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 3, No. 1, hal. 9-18.

Chandra, e t , a l , (2017). Dampak Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Pradigma Ekonomika Universitas Jambi,* 12(2), hal 67–76

Claudia Melgiana, A, I Wayan Rupa, Ni Putu Riasning (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris di Kabupaten Kota Provinsi Bali), *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa,* Vol. 1. No. 1. 45-49

Citra Islamiatus Izzah, Ignatia Martha Hendarti, (2021). AnalisisPengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Upah dan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi,* Universitas Pasundan**,** Vol.v, No.2

Dewi, P. A., & Sutrisna, I. K. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana.*

Digdowiseso, K., & Satrio, M. B. (2022). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada

Vol 7 No 2 (2026) 1104 - 1123 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i2.10536

Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020. Fair Value: *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan.*

Evi Sulastri dan Efendri (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Kabupaten Kota di Seluruh Provinsi di Kalimantan Tahun Anggaran 2015 – 2019). *Jurnal Program Studi Akuntansi*, FEB Universitas Trilogi, Jakarta.

Fani Fadillah, et, al (2023), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan PDRB terhadap Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh, *Jurnal Sosiohumaniora Kodepena Information Center for Indonesian Social Sciences*. *Vol. 4, No.1, Mei 2023, hal. 1-12.*

Febrianti L & Diah Anggeraini Hasri, (2022) Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Produk Domestik Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Nusantara Journal Economics* (NJE) *Univ. Teknologi Sumbawa Mataram,* Vol. 04 No. 02 Desember 2022, hal. 59-67

Fernandes J, Megi Laila Putra, (2022) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada 19 Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat, *Jurnal Menara Ekonomi, FE Univ Muhammadiya Sumatera Barat,* Vol. VIII. No. 1.

Halim, Abdul *et al*, (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Ihsan Maulana, et, al (2022), Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran, PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas. Simalungun,* Vol 4. No. 2 November 2022, hal. 164-170. DOI : 10.36985/ekuilnomi.v4i2.452

Kurniasari, Rizki, (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya* Vol. 10. No. 3 Maret 2021

Lugastoro, D.P, dan Chandra F.A. (2013). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur, *Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya,Malang.*

Mifta Arum Sukma, et, al (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Tengah, Pekalongan, *E- Jurnal Sahmiyya, UIN Gusdur,* Vol. 1. No. 2, hal. 44-57

Vol 7 No 2 (2026) 1104 - 1123 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i2.10536

Muliza, et, al (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Universitas Syahkuala,* Vol. 3. No. 1., Maret 2017, hal. 51-69.

Nur Fitria, D, Asis Riat Winanto, Sayid Abas (2024). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DKI JakartaTahun 2010-2023, *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan (JPEK),* Vol. 8. No. 13, hal. 1170-1178

Pieter Noisirifan de Fretes (2016), Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen, *Jurnal Akuntansi & Ekonomi* UN PGRI Kediri.

Resti Paramita, O. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 – 2018, Skripsi (S1), STIE YKPN Yogyakarta.

Riviando, A, et, al, (2019), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2017), *Jurnal Eksploasi Akuntansi*, *Vol. 1, No. 1,Seri A Februari 2019, hal. 1-17.*

Rizkiyah, J, Hening Anitasari (2023). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial*, *Vol. 6. No. 1. Hlm 1 – 6.*

Rindayati, Wiwiek & Lailatun Nikmah (2024). *Menakar Kinerja Desentralisasi Fiskal di Indonesia*.https://fem.ipb.ac.id.

Sahlan, E, Yusuf, Dodo Susanto (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi, STES Harapan Bima NTB,* Vol 4. No. 1 Maret 2022.

Sari, R. S., & Indrajaya, I. G. B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana,* 3(10), pp 452–459.

Setyowati, L., & Suparwati, Y. K. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). *Jurnal Prestasi*, *9*(1), 113–133.

Siagian, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016. Universitas Negeri Yogyakarta.

Vol 7 No 2 (2026) 1104 - 1123 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i2.10536

Siburian, M.T, et, al, (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011—2018, *Jurnal Tirtayasa Ekonomika, FEB Univ. Sultan Ageng Titayasa,* Vol. 16, No. 1, April

Siswadi, et, al. (2015)**,** Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal, *Jurnal Assets,* Vol. 5, No. 2, Desember 2015, hal 1.12.

Srasa Saswatata,S. (2022). Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Semarang, *Jurnal Serat Acitya UNTAG Semarang*, Vol. 11. No. 1 hlm 17-28

Sugiyono, (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ke-26, Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono (2016). *Makroekonomi : Teori Pengatar*, Edisi Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sulfadli. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar. *Jurnal Kritis Universitas Muslim Indonesia Makassar,* Vol. 3, No.1, hal 1–23.

Thomas Soenarko, Ch, Ignatia Martha Hendrati (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pengeluaran Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Tulungagung, *Journal of EconomicsDevelpment Issues,* Vol. 6. No. 1, pp 10-17

Todaro, M. P dan Stephen C. S, (2011). *Pembangunan Ekonomi*, edisi 11, Erlangga, Jakarta.

UNDP. (2008). *Human Development Report 2007/2008*. United Nations University Pres

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Wahyudin, I., dan Hastuti, (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat", *Indonesian Accounting Research Journal,* Vol. 1, No. 1, hal. 86 – 97.

Williantara, G. F. & Budiasih, I. G. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2044-2070.

Zainuddin et al, (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pembangunan Manusia di Kota Banda Aceh, *Jurnal Pendidikan, Sains dan Humaniora, Univ Serambi Mekkah Banda Aceh,* Vol. X No. 3 April 2022, hal. 207-216.